

KAJIAN KETIMPANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN HASIL PEMEKARAN STUDI KASUS : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Zitni Alma¹

¹ Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota,
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung

¹ Email : zitnialma1@gmail.com

Diterima (received): 10 Januari 2024

Disetujui (accepted): 25 Januari 2024

ABSTRAK

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 14 kota/kabupaten sebelum dimekarkan menjadi dua provinsi, pemekaran daerah tersebut membuat Provinsi Kalimantan Timur kini hanya memiliki 9 kota/kabupaten dimana 5 kota/kabupaten bergabung ke dalam Provinsi Kalimantan Utara. Namun pada tahun 2013 wilayah Kabupaten Kutai Barat yang termasuk dalam Provinsi Kalimantan Timur dimekarkan menjadi Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga Provinsi Kalimantan Timur kini memiliki 10 kota/kabupaten. Berdasarkan rata-rata tahun 2020-2021 sebesar 6,372% merupakan penduduk miskin dan indeks gini sebesar 0,331% hal ini menunjukkan masih terdapat ketimpangan ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antar daerah di daerah hasil pemekaran. Penelitian dilakukan pada Provinsi Kalimantan Timur menggunakan data sekunder tahun 2017-2021. Perkembangan ekonomi dianalisis dengan menggunakan tipologi Klassen dan indeks Entropi Theil agar dapat menunjukkan daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah berkembang, daerah maju tapi lamban tumbuh dan daerah tertinggal serta mengukur ketimpangan antar daerah pada kabupaten/kota hasil pemekaran di Provinsi Kalimantan Timur.

Kata Kunci : Indeks Entropi Theil; Pemekaran Wilayah; Tipologi Klassen

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2012 Provinsi Kalimantan Timur dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Lima kota/kabupaten bergabung ke dalam Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan. Sehingga jumlah kota/kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur berkurang dari 14 menjadi 9 kota/kabupaten. Namun pada tahun 2013, wilayah Kabupaten Kutai Barat dimekarkan dan melahirkan Kabupaten Mahakam Ulu. Saat ini Provinsi Kalimantan Timur memiliki 10 kota/kabupaten. Peraturan yang melandasi terkait pemekaran daerah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemekaran daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 butir a berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Demi mewujudkan pemekaran daerah diperlukan adanya

dukungan antara lain kemampuan fiskal daerah yang tercermin dari kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kontribusi sektor-sektor ekonomi yang tertuang dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur Sebelum dan Sesudah Pemekaran (Persen)

Tahun	Sebelum Pemekaran	Tahun	Sesudah Pemekaran
2007	1,84	2017	3,13
2008	4,90	2018	2,64
2009	2,28	2019	4,7
2010	5,10	2020	-2,87
2011	4,09	2021	2,48

Sumber : Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bagaimana laju pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Kalimantan Timur sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran daerah pada tahun 2012, yang dimana berpisahannya antara Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya pemekaran daerah sebesar 3,64 persen. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi setelah terjadinya pemekaran daerah sebesar 2,02 persen. Terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi bila dibandingkan dengan sebelum adanya pemekaran daerah. Hal ini bisa terjadi salah satu penyebabnya dikarenakan laju pertumbuhan ekonomi yang sempat mengalami penurunan drastis saat adanya pandemi pada tahun 2020. Dalam penelitian (Pujianty & Wibowo, 2019) menyatakan bahwa berkurangnya jumlah pemerintahan kabupaten/kota kurang memacu kompetisi antardaerah dalam Provinsi Kalimantan Timur sehingga daerah lebih memilih berada dalam zona nyaman dengan mempertahankan status quo pengelolaan keuangan APBD. Penelitiannya pun membuktikan bahwa pemekaran daerah memberikan efek yang berbeda dalam hal kinerja APBD. Kinerja APBD untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur baik sebelum dan setelah adanya pemekaran daerah relatif tidak berbeda.

Pemekaran daerah pada prinsipnya bertujuan untuk membuat kinerja pembangunan yang lebih mapan. (Santika et al., 2018) mengungkapkan bahwa pemekaran daerah merupakan solusi terbaik untuk pemerataan pembangunan daerah dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Pada tingkat permulaan, pembangunan ekonomi dibarengi dengan pertumbuhan dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat, dalam banyak kasus di negara berkembang, tidak otomatis menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan (disparity). Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral.

Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju (developed region) dan wilayah terbelakang (underdeveloped region). Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal yakni perbedaan pada distribusi pendapatan serta secara horizontal yakni

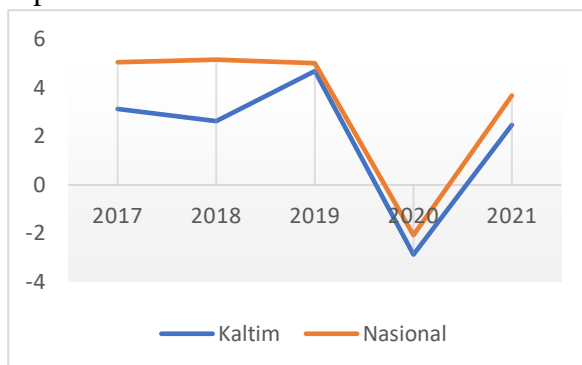
perbedaan antara daerah maju dan terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan antar wilayah. Karena itu aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam studinya (Myrdal, 1957) menemukan bahwa negara yang lebih terbelakang biasanya memiliki ketimpangan wilayah lebih tinggi daripada negara yang lebih maju. Didalam bukunya dijelaskan penyebab adanya ketimpangan wilayah salah satunya adalah vicious circle of poverty (lingkaran kemiskinan) yang dijelaskan dalam teori "Cumulative Causation". Dalam penjelasannya dia menggunakan perumpamaan 'backwash' dan 'spread effect'. Lingkaran kemiskinan merupakan sebuah siklus kemiskinan yang terjadi di negara berkembang. Dalam hal ini masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di negara yang sedang berkembang berdampak pada semakin rendahnya tingkat akumulasi tabungan dalam negeri. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan rendahnya tingkat investasi suatu negara. Rendahnya tingkat investasi ini dapat menyebabkan pencapaian akan pertumbuhan ekonomi menjadi rendah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat menyebabkan terjadinya pendapatan masyarakat menjadi rendah. Proses ini akan terus menerus berlangsung sehingga menyerupai lingkaran yang tidak berujung (vicious circle). Pembangunan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu negara dalam pencapaian tujuan kesejahteraan hidup masyarakat. Teori ini memberikan peringatan yang relevan bagi pembangunan di Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson untuk kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2018 oleh (Handoko et al., 2020) nilai ketimpangan tertinggi di kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Timur selama 4 tahun terakhir terjadi di Kota Samarinda dengan nilai ketimpangan sebesar 0,32. Kota Samarinda memiliki nilai ketimpangan tertinggi disebabkan oleh persentase jumlah penduduk Kota Samarinda menempati urutan ke-2 terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kabupaten Kutai Kertanegara. Persentase penduduk yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), artinya jumlah PDRB per kapita yang terbentuk di Kota Samarinda sangatlah rendah bila dibandingkan dengan PDRB per kapita daerah lainnya. Sementara itu pada tahun 2017 masih terdapat ketimpangan yang cukup signifikan di Kabupaten Kutai timur dengan nilai sebesar 0,26. Pembangunan juga belum berjalan merata, di mana masih tingginya kesenjangan antara satu kabupaten/kota terhadap yang lain. Indeks ketimpangan regional masih bisa diturunkan jika terjadi peningkatan PDRB di Kabupaten Mahakam Hulu dan Penajam Paser Utara.

Bila dibandingkan kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017-2019 sebelum adanya pandemi rata-rata sebesar 3,49 persen yang dimana masih dibawah pertumbuhan nasional yaitu sebesar 5,08 persen. Ketika terjadi pandemi pada tahun 2020 perekonomian diseluruh wilayah Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Pada Provinsi Kalimantan Timur pertumbuhan ekonomi berada di -2,87 persen sedangkan angka pertumbuhan nasional berada di -2,07 persen. Hal ini menunjukkan tidak jauh berbeda kondisinya saat masa pandemi antara Kalimantan

Timur dan nasional. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 tumbuh positif di level 2,48 persen, mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi pada sebesar 2,85 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi regional tersebut masih dibawah pertumbuhan nasional yang mencapai 3,69 persen.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dengan Nasional
Sumber : Diolah dari Bappenas, 2021

Bila dibandingkan kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017-2019 sebelum adanya pandemi rata-rata sebesar 3,49 persen yang dimana masih dibawah pertumbuhan nasional yaitu sebesar 5,08 persen. Ketika terjadi pandemi pada tahun 2020 perekonomian diseluruh wilayah Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Pada Provinsi Kalimantan Timur pertumbuhan ekonomi berada di -2,87 persen sedangkan angka pertumbuhan nasional berada di -2,07 persen. Hal ini menunjukkan tidak jauh berbeda kondisinya saat masa pandemi antara Kalimantan Timur dan nasional. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 tumbuh positif di level 2,48 persen, mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi pada sebesar 2,85 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi regional tersebut masih dibawah pertumbuhan nasional yang mencapai 3,69 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang optimal akan memberikan perubahan pada suatu daerah dan memberikan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakatnya. Menurut (Darwent, 1969) konsep dasar growth pole adalah konsentrasi pertumbuhan ekonomi pada ruang tertentu. Lokasi dalam ruang geografis tidak dipertimbangkan dalam growth pole. Namun, karena semua unit harus memiliki lokasi, dan karena dalam pembangunan ekonomi daerah perlu adanya lokasi, terlepas dari kenyataan bahwa kutub tidak bergantung pada ruang geografis, keberadaan mereka di dalamnya menimbulkan masalah kompleks yang tidak dapat dijelaskan oleh teori kutub pertumbuhan. Gagasan pusat pertumbuhan cenderung berkonsentrasi pada aspek tertentu dari sistem tempat-pusat dan berusaha untuk memperlakukannya secara terpisah.

Berawal dari tujuan pemekaran daerah untuk mensejahterakan masyarakat, dan dengan didasarkan melalui pemekaran dapat mempersingkat alur kendali antara pemerintahan dengan masyarakat yang dilayaninya dapat memperbaiki pemerataan pembangunan, dan membuka peluang mengalirnya sumber daya ke daerah yang

belum berkembang. Penelitian ini ingin menjawab apakah melalui kebijakan pembentukan daerah otonomi baru dari perspektif pembangunan telah memenuhi kaidah dan tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk menguji tingkat keberhasilan dari kebijakan pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran, penelitian ini bertujuan untuk mencoba menganalisis sisi pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan ekonomi di daerah hasil pemekaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti mengambil daerah studi di Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi hasil pemekaran antara Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara. Saat penelitian ini dilakukan, usia provinsi setelah adanya pemekaran daerah yaitu berusia sepuluh tahun (2012 hingga 2022). Tentunya telah menghasilkan capaian pembangunan, sehingga dapat dikaji dan dibandingkan dengan daerah lainnya. Kemampuan membangun dan capaian pembangunan daerah hasil pemekaran, menjadi tolak ukur keberhasilan dari kebijakan desentralisasi. Dengan membandingkan pola perkembangan ekonomi dan ketimpangan regional diharapkan dapat diperoleh gambaran kinerja daerah hasil pemekaran dalam menggerakkan ekonominya dan mengatasi persoalan kesenjangan.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data kuantitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan data terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita serta jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017-2021. Diharapkan melalui ini dapat menggambarkan data daerah secara spesifik.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode kuantitatif melalui pengolahan data sekunder. Untuk menganalisis data terkait dengan pola pertumbuhan dan ketimpangan digunakan metode analisis tipologi klasen dan Indeks Entropi Theil. Berikut penjelasan mengenai analisis yang digunakan dalam penelitian.

a. Analisis Tipologi Klasen

Menurut (Aswandi & Kuncoro, 2002) melalui analisis tipologi Klasen dapat mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Pada dasarnya, tipologi Klasen membagi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu : daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*)

Tabel 2 Klasifikasi Wilayah menurut Tipologi Klassen

PDRB per kapita Laju Pertumbuhan $r_i = r_n$ $r_i < r_n$	$Y_i = Y_n$	$Y_i < Y_n$
	Daerah maju dan tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat
	Daerah maju tetapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Keterangan:

r_i : Laju pertumbuhan PDRB Daerah i

r_n : Laju pertumbuhan PDRB Nasional

Y_i : Pendapatan per kapita Daerah i

Y_n : pendapatan per kapita Nasional

b. Indeks Entropi Theil

Menurut (Kuncoro, 2001) konsep Entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Indeks Entropi Theil merupakan teknik analisis untuk menganalisis kesenjangan ekonomi wilayah selain Indeks Williamson. Tujuan dari Indeks Entropi Theil adalah untuk menganalisis tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah sehingga diketahui tingkat kesenjangan wilayah yang tertinggi dan terendah. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks Entropi Theil menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan wilayah, serta distribusi produk domestik bruto. Indeks Entropi Theil memungkinkan untuk membedakan kesenjangan antar daerah dan kesenjangan dalam suatu daerah. Kriteria perhitungan Indeks Entropi Theil dinyatakan bahwa ketimpangan semakin kecil dan merata apabila semakin mendekati angka nol (0) dan ketimpangan akan semakin besar dan melebar apabila semakin mendekait angka satu (1). Rumus dari indeks Entropi Theil adalah sebagai berikut.

$$I(y) = \sum \left(\frac{y_i}{Y} \right) \times \log \left[\left(\frac{y_i}{Y} \right) / \left(\frac{x_i}{X} \right) \right]$$

Keterangan :

$I(y)$ = Indeks Entropi Theil

Y_i = PDRB per kapita kabupaten i

Y = rata-rata PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Timur

X_i = jumlah penduduk kabupaten i

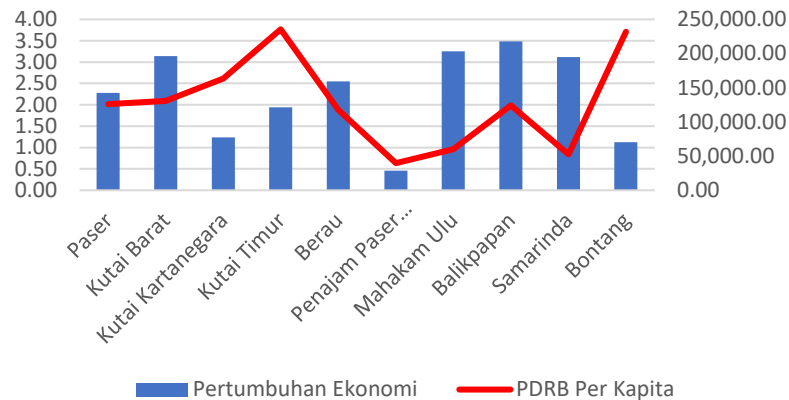
X = jumlah penduduk provinsi Kalimantan Timur

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari perkembangan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonominya. PDRB per kapita menggambarkan produktivitas dari penduduknya dalam satu kurun waktu tertentu.

Zitni Alma, Kajian Ketimpangan Dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Hasil Pemekaran Studi Kasus : Provinsi Kalimantan Timur

Sedangkan data pertumbuhan PDRB menjadi dasar laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.



Gambar 1. Perbandingan PDRB per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dalam Rupiah (Rp) dan Persen (%) tahun 2017-2021
 Sumber : Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan grafik diatas maka hasil dari analisis tipologi Klassen dapat dibagi menjadi empat kuadran seperti pada **Tabel 3**. Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui daerah yang berada di kuadran I yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau dan Kota Balikpapan. Dimana daerah yang berada pada kuadran I dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan PDRB perkapita yang tinggi, sehingga keempat daerah ini termasuk dalam daerah cepat maju dan tumbuh. Hal ini disebabkan karena pada Kabupaten Paser terjadi peningkatan harga komoditas batubara dan peningkatan pada sektor pertanian serta sektor industri dikarenakan perkembangan kelapa sawit yang semakin menghasilkan trend positif dibuktikan dengan industri pengolahan pada Kabupaten Paser didominasi oleh produksi *Crude Palm Oil* (CPO) dan minyak mentah lainnya hasil olahan kelapa sawit. Selain itu pada Kabupaten Berau, dengan adanya industri *pulp* (bubur kertas) dapat menyumbang pada kegiatan ekonomi kabupaten selain aktivitas pada sektor pertambangan.

Tabel 3. Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Kuadran III (Pertumbuhan Ekonomi tinggi & PDRB per Kapita rendah / Daerah berkembang cepat)	Kuadran I (Pertumbuhan Ekonomi Tinggi & PDRB per kapita tinggi / Daerah cepat maju dan tumbuh)
Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Samarinda	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau dan Kota Balikpapan.
Kuadran IV (Pertumbuhan Ekonomi rendah & PDRB per kapita rendah / Daerah relatif tertinggal)	Kuadran II (Pertumbuhan Ekonomi rendah & PDRB per kapita tinggi / Daerah maju tertekan)
Kabupaten Penajam Paser Utara	Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

Sumber : Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Sedangkan daerah yang berada di Kuadran II yaitu Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang dimana daerah ini dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah dan PDRB per kapita tinggi, sehingga ketiga daerah ini termasuk dalam daerah maju

tetapi tertekan. Hal ini disebabkan karena Kota Bontang struktur ekonominya didominasi oleh industri dengan perusahaan skala nasional yaitu PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kaltim. Namun terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dikarenakan produksi gas alam cair di Kota Bontang yang cenderung mengalami penurunan. Penurunan produksi tersebut berdampak pada perekonomian Kota Bontang yang masih bertumpu salah satunya pada hasil industri pengolahan gas alam cair. Pada akhir tahun 2017, ditemukan sumber baru sebagai pemasok bahan baku LNG yaitu dari lapangan migas Jangkrik yang dikelola oleh PT. Eni Indonesia.

Daerah yang berada di Kuadran III yaitu Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Samarinda dimana daerah ini dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan PDRB per kapita rendah, sehingga kedua daerah ini termasuk dalam daerah berkembang cepat. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Mahakam Ulu kegiatan ekonomi didominasi oleh kelompok pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 75,18 persen dan tidak bergantung pada sumber daya alam tak terbarui yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur, nilai PDRB perkapita Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Samarinda tergolong rendah salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang masuk ke Kalimantan Timur di pertengahan Maret 2020. Juga tingkat kemiskinan Mahakam Ulu jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi. Terdapat gap yang cukup tinggi antara kemiskinan di Mahakam Ulu dibandingkan kabupaten/kota lainnya terutama Kota Balikpapan yang mencatat tingkat kemiskinan terendah sebesar sebesar 2,57 persen.

Daerah yang berada di Kuadran IV yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dimana daerah ini dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah dan PDRB per kapita rendah sehingga daerah ini termasuk dalam daerah relatif tertinggal. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Paser, memiliki potensi sektor perkebunan yang sangat menjanjikan. Dikarenakan masih terdapat banyaknya lahan untuk dikembangkan dan menarik para investor untuk berinvestasi disektor ini. Saat ini sedang dikembangkan Kawasan Industri Buluminung yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian wilayah. Namun karena kabupaten ini merupakan kabupaten termuda kedua di Kalimantan Timur setelah pemekaran pada tahun 2002, sehingga belum memiliki kontribusi PDRB yang besar untuk Kalimantan Timur. Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2017-2021 terus didominasi oleh tiga sektor yakni sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri pengolahan. Alasan lain yang menyebabkan kabupaten ini termasuk dalam golongan daerah relatif tertinggal karena infrastruktur yang belum memadai sehingga para investor belum banyak untuk berinvestasi pada daerah ini. Semenjak Kabupaten Penajam Paser Utara ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru seluruh perangkat daerah dan pemerintah nasional berusaha memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur dan perekonomian wilayah ini. Salah satu bentuk upaya pemerintah dengan pembangunan Jembatan Pulau Balang yang diharapkan memudahkan aksesibilitas

antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan sehingga dapat memberikan stimulus positif dalam aktivitas perekonomian.

Jika dilihat secara keseluruhan di Kalimantan Timur yang menjadi penyumbang pendapatan Domestik Regional Bruto atau PDRB yang paling tinggi yaitu masih berada di sektor pertambangan dan penggalian. Provinsi Kalimantan Timur memiliki kandungan sumber daya alam melimpah yang terdiri dari olahan pertambangan batu bara, gas dan minyak bumi serta hutan penghasil kayu. Dimana proses transportasi bahan kekayaan alam tersebut kebanyakan dilakukan melalui akses sungai dikarenakan banyaknya sungai yang terdapat pada provinsi ini.

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pada suatu daerah dapat dianalisis melalui Indeks Entropi Theil. Indeks Entropi Theil digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi pada suatu wilayah. Apabila hasil analisis menunjukkan nilai Indeks Entropi Theil mendekati nol maka hal tersebut memiliki arti ketimpangan yang semakin merata. Namun apabila hasil nilai Indeks Entropi Theil yang semakin jauh dari nol (mendekati angka satu) maka hal tersebut memiliki arti ketimpangan yang semakin tinggi dan melebar. Untuk mengetahui bagaimana tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 hingga tahun 2021, yang dimana sempat melalui fase pandemi sehingga kegiatan perekonomian sempat menurun (trend negatif) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Indeks Entropi Theil Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017-2021

No	Kab/Kota	Indeks Entropi Theil					Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Paser	1,05	1,06	1,13	1,12	1,17	1,11
2	Kutai Barat	1,44	1,52	1,62	1,32	1,33	1,45
3	Kutai Kartanegara	0,97	0,95	1,03	1,05	1,07	1,01
4	Kutai Timur	2,57	2,48	2,70	2,10	1,91	2,35
5	Berau	1,11	1,09	1,18	1,01	1,04	1,09
6	Penajam Paser Utara	0,28	0,28	0,30	0,25	0,23	0,27
7	Mahakam Ulu	0,86	0,92	0,98	0,78	0,75	0,86
8	Balikpapan	0,68	0,72	0,80	0,71	0,74	0,73
9	Samarinda	0,08	0,09	0,11	0,12	0,12	0,10
10	Bontang	3,23	2,96	2,82	2,74	2,69	2,89
	Prov. Kalimantan Timur	1,23	1,21	1,27	1,12	1,10	1,19

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Entropi Theil menunjukkan rata-rata untuk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 – 2021 sebesar 1,19. Angka ini menunjukkan terjadi ketimpangan yang semakin besar (melebar) yang terjadi antar kabupaten dan kota hasil pemekaran di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Bontang memiliki rata-rata tertinggi dengan nilai Indeks Entropi Theil sebesar 2,89 yang menunjukkan terjadinya ketimpangan yang semakin besar. Jika dikaitkan dengan hasil tipologi Klassen Kota Bontang berada pada kuadran II yaitu termasuk kedalam klasifikasi daerah maju tetapi tertekan. Terjadi ketimpangan ekonomi pada Kota Bontang yang disebabkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi walaupun terdapat dua perusahaan nasional yaitu PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kaltim

belum dapat menyerap tenaga kerja yang maksimal dari penduduk di wilayah ini. Sehingga masih menyebabkan ketimpangan ekonomi yang besar.

Selanjutnya wilayah yang memiliki rata-rata nilai Indeks Entropi Theil dengan ketimpangan cukup besar yaitu Kabupaten Kutai Timur sebesar 2,35. Kabupaten Kutai Timur juga berada pada kuadran II yang termasuk kedalam klasifikasi daerah maju tetapi tertekan. Berdasarkan hasil analisis potensi ekonomi yang dilakukan oleh (Maulina, 2021) menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian terlihat dari besaran kontribusi PDRB sektor tersebut terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Timur. Namun faktanya sektor unggulan tersebut belum terdapat adanya hilirisasi yang akan menciptakan peningkatan nilai tambah pada produk tersebut, sehingga belum mampu memberikan multiplier effect pada sektor lainnya. Salah satu usaha pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di wilayah ini dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan PP No.85 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan. Melalui pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah perekonomian melalui industrialisasi atas berbagai komoditi dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Kota Balikpapan berdasarkan tipologi kelas berada pada kuadran I serta memiliki nilai indeks Entropi Theil sebesar 0,73. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan yang cukup besar di Kota Balikpapan. Perekonomian Kota Balikpapan didominasi oleh industri pengolahan, salah satu komoditas yang cukup terkenal yaitu karet. Potensi tanaman karet yang terdapat di Kota Balikpapan mampu meningkatkan perekonomian wilayah sehingga tidak bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian. Namun Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Berau menunjukkan perbedaan yang cukup tajam, berdasarkan hasil tipologi Kelas sama-sama berada pada kuadran I dengan Kota Balikpapan. Tetapi pada indeks Entropi Theil ketiga wilayah ini menunjukkan hasil nilai-rata yang cukup tinggi dengan artian termasuk dalam wilayah dengan ketimpangan yang besar. Sektor yang menjadi primadona pada Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat yaitu pertambangan dan penggalian namun belum cukup untuk memberikan dampak sehingga ketimpangan perekonomian masih terjadi. Namun melalui sektor industri pengolahan pada Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau diharapkan dapat membantu mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi pada kedua wilayah tersebut. Mengingat meningkatnya produksi olahan kelapa sawit di Kabupaten Paser serta industri pulp di Kabupaten Berau mampu memberikan pertumbuhan positif pada perekonomian wilayah masing-masing.

Berbeda dengan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan hasil pemekaran dari wilayah tersebut berdasarkan hasil tipologi kelas berada di kuadran III yaitu tergolong daerah berkembang cepat dengan nilai indeks Entropi Theil sebesar 0,86 dimana ketimpangan terjadi cukup besar. Sebagai kabupaten termuda setelah Kabupaten Penajam Paser Utara, perekonomian di wilayah ini didominasi oleh sektor pertanian serta merupakan sektor penyumbang utama pada PDRB di Kabupaten Mahakam Ulu. Menurut hasil penelitian (Karmini & Karyati, 2021) menunjukkan kegiatan ekonomi pada lapangan usaha pertanian potensial untuk dikembangkan pada tingkat lokal di Kabupaten Mahakam Ulu

karena didukung oleh potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang perlu dimanfaatkan secara intensif. Sehingga melalui pemanfaatan potensi ini dengan maksimal dapat mengurangi tingkat ketimpangan perekonomian wilayah dan membantu memberikan kontribusi untuk Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Paser berdasarkan hasil tipologi Klassen berada di kuadran IV yaitu tergolong daerah yang relatif tertinggal, mengingat kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran termuda. Namun berdasarkan hasil indeks Entropi Theil dengan nilai sebesar 0,27 menunjukkan ketimpangan yang kecil dan merata. Saat ini yang mendominasi kegiatan perekonomian pada Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri pengolahan. Industri pengolahan yang saat ini sedang naik daun yaitu olahan kelapa sawit (CPO) yang berada di Kecamatan Penajam dan termasuk dalam Kawasan Industri Buluminung (KIB). Melalui pengembangan Kawasan Industri Buluminung (KIB) yang nantinya dapat terkoneksi dengan Kawasan Industri Kariangau di Kota Balikpapan, diharapkan dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi wilayah ini. Serta dengan adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang berada di wilayah Kecamatan Sepaku, membawa dampak positif bagi infrastruktur untuk Kabupaten Penajam Paser Utara. Sehingga semakin tinggi konektivitas dengan wilayah lainnya dapat menambah minat investor untuk memindahkan industrinya ke kawasan industri KIB. Melalui pengembangan kawasan industri ini diharapkan dapat mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi dan dapat menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kedua kabupaten yang merupakan hasil pemekaran yaitu Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kedua kabupaten ini merupakan daerah termuda di Kalimantan Timur, namun dilihat melalui analisis tipologi kelas kedua daerah ini berada pada kuadran yang berbeda. Kabupaten Mahakam Ulu berada pada kuadran III yang merupakan sedikit lebih unggul dari Kabupaten Penajam Paser Utara. Bila dilihat dari potensinya, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki keunggulan dalam pengembangan pada sektor pertanian. Seperti yang disampaikan oleh (Rusdiana et al., 2017) Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas hutan, memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan khususnya potensi subsector kehutanan dan pertanian. Potensi pengembangan kehutanan di Kabupaten Mahakam Ulu diantaranya adalah pengembangan pola hutan masyarakat dengan komoditas utama hasil hutan bukan kayu, usaha jasa lingkungan berupa ekowisata, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), hutan tanaman serta hutan adat. Komoditas pertanian yang potensial untuk dikembangkan pada wilayah ini yaitu padi sawah, padi ladang, karet, kakao dan kelapa sawit. Apabila dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran maka akan memberikan kontribusi pada perekonomian wilayahnya.

Sedangkan pada Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sofi, 2020) sektor ekonomi yang merupakan sektor basis di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan,

sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi dan real estate, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor jasa lainnya. Sektor yang paling potensial untuk dikembangkan demi meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah sehingga tidak bergantung pada sektor pertambangan yaitu sektro pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Penajam Paser Utara dianggap mampu untuk melakukan ekspor selain untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri. Walaupun terjadi penurunan komoditi yang diekspor namun tetap menjadi sektor paling potensial karena memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian. Namun hal ini perlu didukung dengan program pemerintah daerah melalui alokasi penganggaran di dalam APBD. Kabupaten Penajam Paser Utara berbeda dengan sebagian besar daerah di Kalimantan Timur lainnya, dimana sektor pertambangan dan penggalian hanya menjadi sektor nonbasis.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) juga namun pertumbuhan ekonomi masih dibawah Kabupaten Mahakam Ulu, diperlukan pengembangan sektor lain seperti sektor konstruksi dan real estate yang dimana merupakan sektor unggulan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini dapat ditingkatkan sehingga berdampak kepada peningkatan pendapatan masyarakat dan menambah lapangan kerja baru. Hal ini sejalan dengan program prioritas nasional terkait pembangunan IKN. Selain itu perlu diperhatikan pengembangan pada sektor yang saat ini masih menjadi sektor non basis yaitu seperti sektor transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi. Sektor tersebut saat ini masih merupakan sektor non basis, namun apabila dikelola dengan baik dapat menjadi alternatif dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

D. KESIMPULAN

Melalui adanya kebijakan akan pemekaran daerah memberikan kesempatan kepada daerah hasil pemekaran untuk berwenang dalam membangun daerahnya dengan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatasi permasalahan tentang kesenjangan antar daerah. Dari studi daerah pemekaran Provinsi Kalimantan Timur diperoleh gambaran bahwa ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur dalam Indeks Entropi Theil yang cukup tinggi dan melebar. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Entropi Theil menunjukkan rata-rata untuk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 – 2021 sebesar 1,19. Angka ini menunjukkan terjadi ketimpangan yang semakin besar (melebar) yang terjadi antar kabupaten dan kota hasil pemekaran di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Bontang memiliki rata-rata tertinggi dengan nilai Indeks Entropi Theil sebesar 2,89 yang menunjukkan terjadinya ketimpangan yang semakin besar. Jika dikaitkan dengan hasil tipologi Klassen Kota Bontang berada pada kuadran II yaitu termasuk kedalam klasifikasi daerah maju tetapi tertekan. Selanjutnya wilayah yang memiliki rata-rata nilai Indeks Entropi Theil dengan ketimpangan cukup besar yaitu Kabupaten Kutai Timur sebesar 2,35. Kabupaten Kutai Timur juga berada pada kuadran II yang termasuk kedalam klasifikasi daerah maju tetapi tertekan. Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, namun faktanya sektor unggulan tersebut belum terdapat adanya hilirisasi yang akan menciptakan peningkatan nilai tambah pada produk tersebut, sehingga belum mampu memberikan *multiplier effect* pada sektor lainnya.

Ketimpangan yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur menjadi tantangan daerahnya dalam membangun konektivitas ekonomi antar wilayahnya, terutama dalam mengatasi persoalan ketimpangan. Maka dari itu merupakan suatu hal yang lazim dalam proses pembangunan suatu wilayah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Dalam mengatasi ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia khususnya pada Provinsi Kalimantan Timur diperlukan adanya penyebaran atau meningkatkan pembangunan prasarana perhubungan guna memperlancar mobilitas barang produksi antar daerah seperti meningkatkan prasarana perhubungan dan penyebrangan laut, lalu mendorong proses transmigrasi dan migrasi spontan guna menjawab permasalahan akan kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang, kebijakan lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah adalah pengembangan pusat pertumbuhan (*Growth Poles*) secara tersebar melalui hal ini diharapkan mengurangi ketimpangan antar wilayah karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi secara sekaligus, kebijakan selanjutnya yaitu pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan juga dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Dalam menjalankan kebijakan mengenai pemekaran daerah atau desentralisasi, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek pemusatan ekonomi dari sisi ruang atas daerah yang akan dimekarkan. Tidak seluruh daerah pada Provinsi Kalimantan Timur bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian, terdapat beberapa daerah yang didominasi oleh kegiatan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan yang juga dapat meningkatkan pertumbuhan perkonomiannya. Melainkan beberapa periode sebelumnya pertumbuhan perekonomian sempat turun drastis dikarenakan harga jual batu bara di dunia anjlok dan memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian. Apabila pertimbangan pemusatan ekonomi diabaikan, maka kecenderungan tuntutan untuk pemekaran daerah yang tertinggal akan meningkat. Pada akhirnya kebijakan pemekaran yang pada mulanya dimaksudkan untuk mengatasi ketidakpuasan akibat ketimpangan antarwilayah akan menciptakan ketimpangan baru karena daerah pemekaran gagal dalam pemerataan pusat pertumbuhan atau membangun konektivitas antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2022). Profil Analisis Daerah (PRADA) <https://prada.bappenas.go.id/dashboard/makro?provinsi=Kalimantan+Timur> diakses pada 24 oktober 2022
- Darwent, D. (1969). *Growth Poles and Growth Centers in Regional Planning*.
- Aswandi, H. (Universitas G. M., & Kuncoro, M. (Universitas G. M. (2002). Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 17(1), 27–45.
- Handoko, M. S. H., Riyanto, W. H., & Syaifullah, Y. (2020). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Provinsi

Zitni Alma, Kajian Ketimpangan Dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Hasil Pemekaran Studi Kasus : Provinsi Kalimantan Timur

- Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(4), 637–649.
<https://doi.org/10.22219/jie.v4i4.13951>
- Karmini, K., & Karyati, K. (2021). Analisis Potensi Ekonomi Lokal Dan Model Pengembangan Pertanian Di Kabupaten Mahakam Ulu. *Agrifor*, 20(2), 223. <https://doi.org/10.31293/agrifor.v20i2.5606>
- Kuncoro, M. (Universitas G. M. (2001). Analisis Spasial dan Regional. UPP AMP YKPN.
- Maulina, R. (2021). Analisis Alternatif Potensi Ekonomi Regional Kabupaten Kutai Timur Menggunakan Metode Location Quotient (Lq), Shift Share, Dan Tipologi Klassen. *BESTARI: Buletin Statistika Dan Aplikasi Terkini*, 1(2), 51–59.
- Myrdal, G. (1957). Myrdal (1957) - Economic Theory and Underdeveloped Regions. In *Economic Theory and Underdeveloped Regions*.
- Pujianty, D., & Wibowo, P. (2019). Geliat Provinsi Kalimantan Timur Pasca Pemekaran Daerah. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1(2), 58. <https://doi.org/10.36087/jrp.v1i2.33>
- Rusdiana, O., Supijatno, S., Ardiyanto, Y., & Widodo, C. E. (2017). Potensi Pengembangan Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 114. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.114-131>
- Santika, R. H., Santoso, B., & Mahmudi, H. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.15-23>
- Sofi, I. (2020). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 - 2019. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 2(2), 112–130.